

**RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DALAM REFORMASI BIROKRASI
(Analisis terhadap PP No 41 Tahun 2007 pada Pemerintah Kabupaten
Sampang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Roesalina Fenty Effendi

0510310117



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
MALANG
2009**

IF U NEVER FAILED, U NEVER LIVED

(BROTHER SPOKE)



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Karya tulis ini ku persembahkan untuk

My Father and My Mother

My Brother and My Sister

My Man

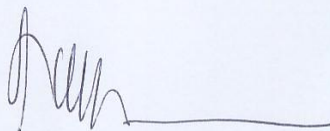
TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

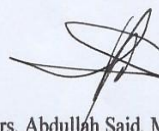
Hari : Senin
Tanggal : 18 Mei 2009
Jam : 14.00-15.00
Skripsi atas nama : Roesalina Fenty Effendi
Judul : Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah dalam
Reformasi Birokrasi (Analisis terhadap PP No 41
tahun 2007 pada Pemerintah Kabupaten Sampang)

dan dinyatakan LULUS

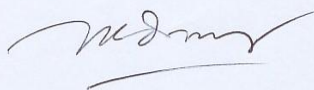
MAJELIS PENGUJI



Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, M.A, Ph.D
Ketua



Drs. Abdullah Said, M.Si
Anggota



Dr. Mardiyono, MPA
Anggota



Drs. Mochamad Rozikin, MAP
Anggota

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya ini dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 18 Mei 2009

Mahasiswa,



Nama : Roesalina Fenty Effendi
NIM : 0510310117

RINGKASAN

Roesalina Fenty Effendi, 2005, **Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah dalam Reformasi Birokrasi (Analisis terhadap PP No 41 Tahun 2007 Pada Pemerintah Kabupaten Sampang)**. Prof. Drs. Solichin A. W., M. A. PhD, Drs. Abdullah Said, M. Si. 137 hal + xix

Penelitian ini dilakukan atas dasar banyaknya pandangan tentang terlalu gemuknya birokrasi dengan fungsi yang kurang terfokus sehingga menimbulkan tumpang tindih tugas, serta kurang efektif dan efisiennya birokrasi dalam memberikan pelayanan. Reformasi birokrasi merupakan langkah kongkrit yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Restrukturisasi merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memperbaiki struktur birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. PP No 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah merupakan pedoman bagi daerah dalam melakukan restrukturisasi. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa penyusunan perangkat daerah menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan APBD. PP ini juga berlaku di Pemerintah Kabupaten Sampang dengan harapan organisasi Pemerintah Kabupaten Sampang menjadi lebih efektif dan efisien dalam struktur dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Fokus dari penelitian ini adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sampang sebelum adanya PP No 41 tahun 2007, restrukturisasi organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sampang dengan adanya PP No 41 tahun 2007, serta faktor pendukung dan penghambat dalam restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Sampang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik interview, observasi, dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini adalah Kepala/Staff Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang bagian organisasi, serta satuan kerja perangkat daerah lainnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, verifikasi data, dan penyajian data

Hasil dari penelitian ini antara lain, pertama perangkat daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sampang sebelum adanya PP No 41 tahun 2007 adalah sekretaris daerah dengan 3 asisten, sekretaris DPRD, dinas daerah berjumlah 14, lembaga teknis daerah berjumlah 12, kecamatan dan kelurahan. Kedua restrukturisasi berdasarkan PP No 41 tahun 2007 di Pemerintah Kabupaten Sampang adalah, sekretaris daerah dengan 3 asisten, sekretaris DPRD, dinas daerah berjumlah 15, lembaga teknis daerah berjumlah 11, kecamatan dan kelurahan. Ketiga Faktor pendukung restrukturisasi organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sampang yaitu adanya PP No 41 tahun 2007, adanya tim pengkaji dan tim teknis otonomi daerah, sumber daya manusia, visi dan misi daerah dan kepala daerah, serta dana. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: proses verifikasi yang lama dan politik.

SUMMARY

Roesalina Fenty Effendi, 2005, **Restructuring Local Government Organizations In Bureaucratic Reform (An Analysis to Government Act No 41 of 2007 in the Sampang Regency)**. Prof. Drs. Solichin A. W., M. A. PhD, Drs. Abdullah Said, M. Si. 137hal + xix

Research was conducted on the basis of the number of views on big size bureaucracy with unfocused functions, giving rise to the task, and less effective and efficient in providing services. Bureaucracy reform is a concrete step that must be implemented by the government in handling the problem. Restructuring is part of the bureaucratic reform which aims to improve the structure of the bureaucracy to become more effective and efficient. Government Act No 41 of 2007 on the organization is a tool for guidance in conducting the restructuring. Government Act is described in the preparation of local government that use a variable number of regional population, area, and APBD. This regulation also applies in the district government in the hope lacker districts lacker organizations become more effective and efficient in structure and services provided to the community.

The focus of this research is the regional government of Sampang Regency before Government Act No 41 of 2007, restructuring the organization regional government of Sampang Regency with Government Act No 41 of 2007, while the factors that support and resist of organizational restructuring in the Sampang regency.

This study uses qualitative methods. Data collection using the interview technique, observation, and documentation. Primary data in this research is the Head / Staff Secretary of Sampang regency sub organization, and other local government of sampang regency. This research using the Miles and Hubermans Method, namely data reduction, data verification, and continuous data.

The results from this research consist of three main points. First, local government of sampang regency before the Government Act No 41 of 2007 are a regional secretary with 3 assistants, Legislative secretary, 14 of local office, 12 of local technical institution, districts and villages. Second, restructuring based on Government Act No. 41 of 2007 in the Sampang regency are regional secretary with 3 assistants, Legislative secretary, 15 of local office, 11 of local technical institution, districts and villages. Third factors that supporting the restructuring of local government of sampang regency are the Government Act No 41 of 2007, inspection or investigation team and technical team of regional autonomy, human resources, vision and mission official and the region, and funds. While obstacle among other factors are the verification process and politics.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah dalam Reformasi Birokrasi (Analisis terhadap PP No 41 Tahun 2007 pada Pemerintah Kabupaten Sampang)**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas dorongan dan doa restunya yang senantiasa mengiringi perjalanan penulis dalam menuntut ilmu
2. Bapak Prof. Drs. Solichin A. W., M. A. PhD, selaku dosen pembimbing serta Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Publik
3. Bapak Drs. Abdullah Said, M. Si, selaku dosen pembimbing
4. Bapak Dr. H. Suwarno MM, selaku kepala bagian organisasi Pemerintah Kabupaten Sampang, serta Bapak Erfin P. Hasibuan SE., Bapak Taufikurrahman SH., dan Ibu Sufia Kurniati ST, atas informasi dan bantuan yang telah diberikan
5. Bapak Prof. Dr. Sumartono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
6. Rekan-rekan angkatan 2005 yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 18 Mei 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
MOTTO	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	i
RINGKASAN.....	ii
SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Mengapa Restrukturisasi Organisasi Penting Dalam Reformasi Birokrasi	8
1. Restrukturisasi Sebagai Keharusan Dalam Organisasi Modern.....	8
2. Macam-macam Restrukturisasi.....	11
3. Unsur-unsur Pokok Restrukturisasi.....	12
B. Birokrasi	14
1. Tujuan Reformasi Birokrasi dan Strategi Pencapaiannya	14
2. Model Organisasi Weberian dan Kelemahan- kelemahannya	19
3. Kategori Birokrasi	22
4. Good Governance and Reinventing Government David Osborne & Ted Gaebler.....	23
C. Kebijakan Publik	27

1. Pengertian Kebijakan Publik dan Ruang Lingkupnya.....	27
a. Pengertian Kebijakan Publik	27
b. Bentuk Kebijakan Publik.....	28
c. Tipologi Kebijakan.....	28
d. Elemen Kebijakan	29
2. Analisis Kebijakan Publik.....	30
a. Pengertian Analisis.....	30
b. Ruang Lingkup.....	31
c. Bentuk-bentuk Analisis	31
d. Model-model Analisis Kebijakan	34
e. Pendekatan Analisis Kebijakan	37
D. Struktur Lembaga Daerah	37
E. PP No 41 tahun 2007	41
F. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang dengan PP No 41 Tahun 2007.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Fokus Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Instrumen Penelitian.....	50
G. Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Kabupaten Sampang	53
1. Sejarah dan Kedudukan Wilayah Kabupaten Sampang	53
a. Sejarah Kabupaten Sampang	53
b. Kedudukan Wilayah dalam Lingkup Perkembangan Wilayah.....	54
2. Kondisi Fisik	55
a. Letak Geografis.....	55
b. Kelerengan dan Ketinggian	55
c. Keadaan Topografi.....	57
d. Wilayah Administrasi Kabupaten Sampang	57
e. Klimatologi.....	63
3. Demografi	64
B. Penyajian Data	65
1. Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang Sebelum PP No 41 tahun 2007	65
2. Restrukturisasi organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang dengan berlakunya	

PP No 41 tahun 2007	85
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Restrukturisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang	111
C. Analisis dan Interpretasi Data	
1. Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang Sebelum PP No 41 tahun 2007	113
2. Restrukturisasi organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang dengan berlakunya PP No 41 tahun 2007	115
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Restrukturisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang	131
Bab V PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	136

DAFTAR PUSTAKA

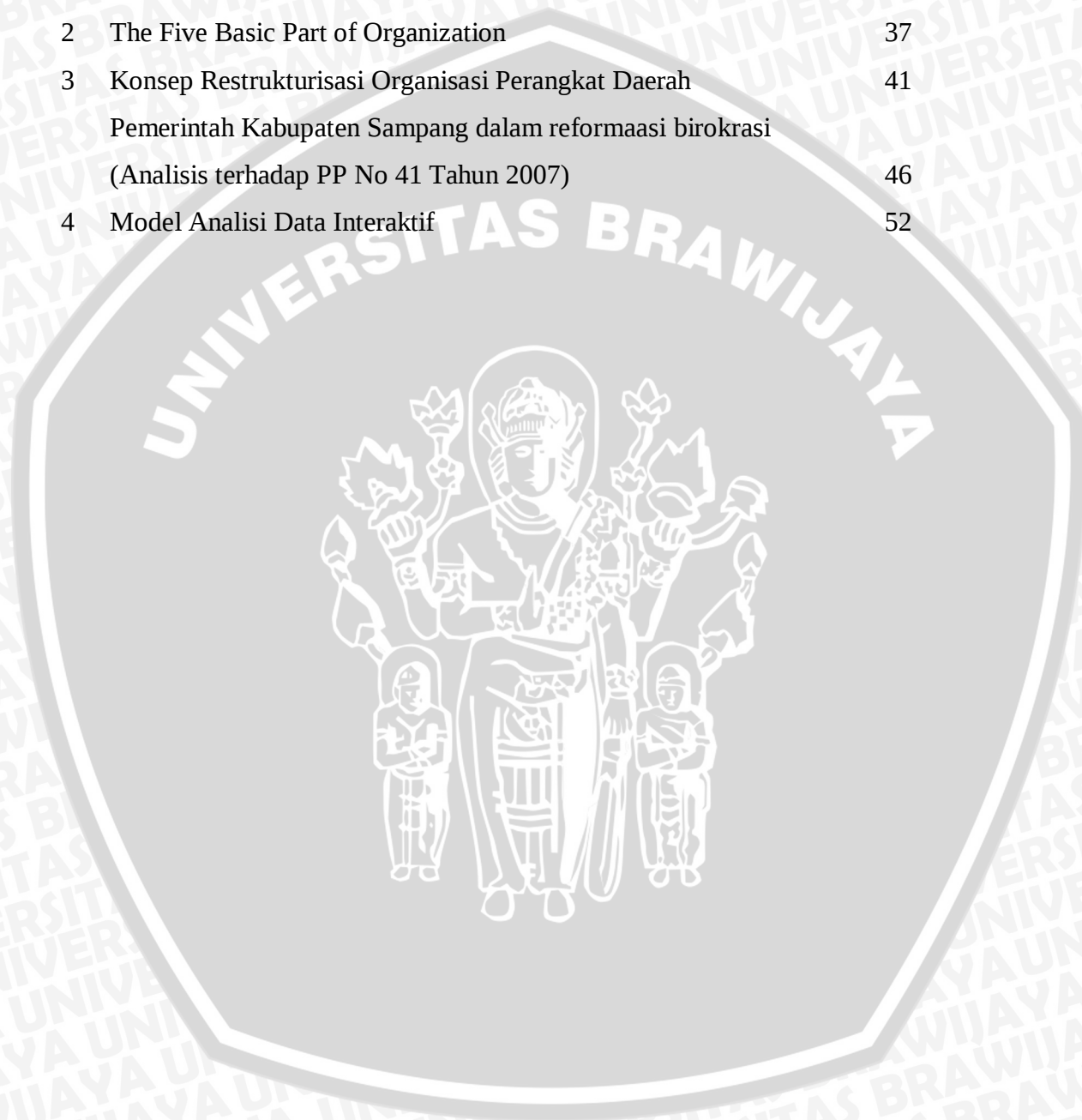


DAFTAR TABEL

	Hal
1. Pendekatan dalam Sistem Analisis Kebijakan	37
2. Bagian-Bagian Pokok Institusi Pemerintah Daerah	39
3. Perbandingan antara PP No 84 tahun 2000, PP No 8 tahun 2003 dan PP No 41 tahun 2007	44
4. Kelerengan Kabupaten Sampang	56
5. Ketinggian dari Permukaan Air Laut	57
6. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Sampang	58
7. Kondisi Iklim Kabupaten Sampang	63
8. Jumlah Penduduk Kabupaten Sampang Tahun 2004-2008	64
9. Penetapan Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten	119
10. Besaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sampang Berdasarkan PP No 41 tahun 2007	120
11. Rekapitulasi Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sampang	121
12. Perangkat Daerah Kabupaten Sampang Sebelum dan Sesudah Restrukturisasi	122
13. Perumpunan Urusan yang Diwadahi dalam Bentuk Dinas	126
14. Perumpunan Urusan yang Diwadahi dalam Bentuk Badan/Kantor	128

DAFTAR GAMBAR

	Hal
1 Elemen Sistem Kebijakan	29
2 The Five Basic Part of Organization	37
3 Konsep Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang dalam reformaasi birokrasi (Analisis terhadap PP No 41 Tahun 2007)	41 46
4 Model Analisi Data Interaktif	52



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara
2. Peta Kabupaten Sampang

